

Perilaku Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pemanfaatan Penggunaan Dana Pinjaman Dan Pendapatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Behavior of Non-Governmental Organizations in Utilizing the Use of Loan Funds and Revenues of Urban Poverty Reduction Projects (P2KP)

Daswati, Syahrudin Hattab

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako
Email: daswatisahar@gmail.com

(Diterima: 3-Maret-2018; di revisi: 9-Mei-2018; dipublikasikan: 30-Juni-2018)

ABSTRACT

Proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), merupakan suatu kelembagaan yang dibangun oleh dan untuk masyarakat. Program tersebut secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat yang terorganisir dalam kelompok swadaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku kelompok swadaya masyarakat dalam pemanfaatan penggunaan dana pinjaman dan pendapatan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari informan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan terdiri Lurah, BKM, KSM, Fasilitator Ekonomi, tokoh masyarakat, dan Rumah tangga sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok swadaya masyarakat memiliki perilaku rasa keterikatan pada organisasi (komitmen) belum efektif sehingga pemanfaatan dana bergulir belum dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan, terbukti dari 87 masyarakat yang terlibat pada KSM ada 60 % yang tepat waktu, 16 % kadang tepat waktu, 24 % yang tidak tepat waktu. Prestasi kerja (motivasi) anggota bervariasi ada yang terpaksa, ikut-ikutan dan kesadaran sendiri sehingga dana bergulir cara pengembalian bervariasi, karena masih ada anggota masyarakat yang terlibat dalam kelompok berdasarkan terpaksa (5 %) atau rasa ikut-ikutan (9 %). Steers (1985) berpendapat bahwa mustahil sebuah organisasi efektif tanpa ada rasa keterikatan dan prestasi para pekerja.

Kata kunci: Komitmen, Prestasi kerja

ABSTRACT

The urban poverty reduction project (P2KP), is an institution built by and for the community. The program substantially seeks to reduce poverty through the concept of empowering communities organized in self-help groups. This study aims to analyze and explain the behavior of self-help groups in the utilization of the use of loan funds and income from urban poverty reduction projects (P2KP). The research location was in Palu Timur Subdistrict, Palu City, with descriptive qualitative research. Sources of data obtained from informants with interview, observation and documentation techniques. Informants consist of village heads, BKM, KSM, economic facilitators, community leaders, and target households. The results showed that self-help groups had a lack of effective attachment to the organization (commitment) so that the utilization of revolving funds had not been returned according to the time specified, as evidenced by 87% of the 87 communities involved on time, 16% sometimes on time, 24% that is not timely. Work performance (motivation) varies, there are those who are forced, follow-up and self-awareness, so the revolving way of returning funds varies, because there are still community members who are involved in groups based on forced (5%) or sense of belonging (9%). Steers (1985)

argues that it is impossible for an organization to be effective without the sense of attachment and achievement of the workers.

Keywords: Commitment, work performance

PENDAHULUAN

Penanganan permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Oleh karena itu pendekatan ekonomi dalam bentuk pemberdayaan menjadi salah satu strategi untuk pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekuarangan dan objek pasif penerima pelayanan saja, melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisir untuk perbaikan hidupnya, namun kegagalan tetap saja terjadi dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum merata karena masih banyaknya ditemukan rumah tangga sasaran yang tergolong miskin, seperti halnya di Kota Palu berjumlah 1272 Rumah Tangga Sasaran (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, 2012).

Kota Palu merupakan salah satu mata rantai dari dua belas mata rantai Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Tengah, Luas Wilayah 395, 06 Km² dengan kondisi topografi bervariasi berupa daerah lembah, pegunungan, pesisir teluk Palu, jumlah penduduk Kota Palu pada akhir tahun 2017 sekitar 368.086 terbagi dalam 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, 2012). Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan pemerintah kota Palu tetap mengacu pada Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014 (TNP2K, 2015). Adanya kebijakan ini pemerintah kota Palu komitmen untuk terus melakukan penanganan berkelanjutan terhadap dua permasalahan pokok kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Komitmen pemerintah Kota Palu diwujudkan secara nyata melalui dukungan APBD terhadap 3 kluster sebagai strategi kegiatan yaitu: (1) Kluster pertama merupakan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih maupun sanitasi. Kluster ini dilaksanakan melalui berbagai program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). (2) Kluster kedua, merupakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan. Secara nasional kluster ini diselenggarakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan berbagai jenisnya seperti PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan atau program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Selain itu juga ada Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif. Di Kota Palu juga dilaksanakan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui pemberian bantuan usaha kepada Rumah Tangga Sasaran (RTM) sebesar Rp. 2.500.000. (3) Kluster ketiga, merupakan penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Kluster ketiga ini dilaksanakan melalui pemberian kredit usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha bersama (KUBE) dan UKM (Usaha kecil dan Menengah) yang memberikan keunggulan kompetitif kepada anggotanya (Guzey, 2011).

Keterkaitan dengan fokus penelitian ini, bahwa upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan RTS hingga dapat melampaui atau minimal mendekati garis kemiskinan namun juga menjaga agar penduduk yang hampir miskin tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan namun juga agar penduduk yang hampir miskin tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Ada 2 indikator yang digunakan kemiskinan yaitu kelompok keluarga pra KS dan Kelompok keluarga KS 1. Ke dua indikator inilah yang dianggap pemerintah layak mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui wadah P2KP.

Bentuk pelaksanaan P2KP adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan dalam bentuk pinjaman dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat, baik yang sifatnya bergulir maupun hibah sekitar Rp. 250 juta hingga Rp. 750 juta per-kelurahan tergantung luas wilayahnya, serta memberi bantuan teknis berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan organisasi di tingkat komunitas, dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam pemberian dana, maka peneliti mengkaji tentang perilaku kelompok swadaya masyarakat dalam pemanfaatan dana bergulir dari P2KP, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat terhadap komitmen waktu pengembalian dana yang dipinjamkan serta bagaimana prestasi pekerja dalam memotivasi terhadap keterlibatan dalam kelompok swadaya masyarakat, karena Steers & Porter (1985) menjelaskan bahwa karakteristik pekerja dalam organisasi dapat dilihat dari aspek komitmen dan prestasi. Teori inilah peneliti mengadopsi untuk dijadikan sebagai Grand Theory untuk membahas tentang perilaku kelompok swadaya masyarakat dalam pemanfaatan dana pinjaman dan pendapatan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan naturalistic. Sumber data diperoleh melalui data sekunder (studi dokumentasi, dokumen dari P2KP serta pemerintah Kota Palu), dan data primer diperoleh melalui keterangan, wawancara dengan informan). Informan terdiri Lurah, BKM, KSM, Fasilitator Ekonomi, tokoh masyarakat, dan Rumah tangga sasaran. Teknik penjarangan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara. Pengabsahan data (1) kredibilitas (triangulasi data, analisis, kecukupan referensi, member cheks, (2) Audit Trait. Sedangkan teknis Analisis data yaitu reduksi data, display data dan Informan terdiri Lurah, BKM, KSM, Fasilitator Ekonomi, tokoh masyarakat, dan Rumah tangga sasaran. pengambilan keputusan serta verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengkaji tentang Prilaku kelompok tidak lepas dengan perilaku individu dan perilaku organisasi. Keterkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan perilaku individu adalah perilaku masyarakat yang mendapat dana bergulir dari P2KP melalui kelompok swadaya masyarakat. Sedangkan perilaku organisasi tidak lain adalah interaksi antar pemerintah pemberi dana dengan pengguna dana dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palu. Setelah menjelaskan kedua perilaku tersebut, maka peneliti beranggapan bahwa perilaku kelompok merupakan sikap dan prestasi kerja para pengelola dan pengguna dana bergulir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kelompok sasaran (Steers & Porter, 1985b),

Mengadopsi pendapat Steers & Porter (1985a), karakteristik pekerja dalam organisasi dapat dilihat dari aspek komitmen dan prestasi. Teori inilah peneliti jadikan sebagai *Grand Theory* untuk membahas tentang perilaku kelompok swadaya masyarakat dalam pemanfaatan dana pinjaman dan pendapatan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

Perilaku pada Aspek Komitmen dalam Pemanfaatan Dana Bergulir

P2KP dan BKM dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat dikelola secara efektif. Secara teoritis Steers & Porter (1985a), berpendapat bahwa tanpa ada komitmen dalam sebuah organisasi, pasti tidak mencapai tujuan secara efektif. Luthans (2006) komitmen organisasi yaitu: (1) keinginan kuat untuk selalu sebagai bagian organisasi tertentu; (2) keinginan untuk mengupayakan keras cocok permintaan organisasi; dan (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan target organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan kesetiaan anggota terhadap organisasi dan sistem berkelanjutan di mana bagian organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan dan juga kemajuan yang berkelanjutan.

Buku Pedoman tentang pengelolaan Dana bergulir menjelaskan bahwa dana bergulir yang diterima masyarakat agar dapat “*sustainable*” dan berkembang membutuhkan komitmen dari anggota KSM untuk tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman. Jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir sebanyak Rp.3.000.000 s/d Rp. 6.000.000 juta, maksimum pengembalian selama 12 bulan, tetapi bisa kurang dari itu tergantung jenis usaha maupun putaran usahanya. Kondisi di lapangan yang terjadi yaitu jangka waktu pengembalian di Kecamatan Palu Timur yang ditetapkan oleh BKM adalah 12 bulan, dengan setiap bulannya mengangsur sesuai dengan kemampuan anggota KSM. Hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palu sangat bermanfaat, terbukti ada 87 anggota BKM yang terlibat dalam program tersebut.

Mencermat hasil observasi dapat dikatakan bahwa implementasi proyek P2KP sebagai “gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal” sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bahkan di yakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi dana bergulir mempunyai manfaat yang besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.

Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa masyarakat masih ada yang tidak memegang prinsip komitmen artinya tidak disiplin waktu untuk pengembalian dana. Masih ada masyarakat tertunggak sekitar 35 % disebabkan karena penghasilan pengguna dana belum mencukupi. Selain penghasilan masyarakat kurang, juga ada masyarakat yang menggunakan dana tidak berhasil mengembangkan sehingga berada pada kategori bangkrut. Informasi dari BKM bahwa anggota KSM yang dinyatakan tertunggak dikenakan denda 5 %. Jika waktu yang telah ditentukan tidak diperhatikan maka anggota KSM diberi teguran. Perilaku inilah yang merupakan tanggung jawab implementor untuk mengefektifkan pemanfaatan dana bergulir tersebut. Sekitar 66 atau 76 % yang mengembangkan usahanya seperti jual makanan, minuman, sayuran, ikan, baju, warung klontong, warung nasi, pulsa dan konter HP, Bambu, air bersih dan lain sebagainya. Serta 4 SKM atau 5 % usaha dibidang jasa yang meliputi salon, bengkel motor, penjahit, kamar kos, foto kopi. Untuk perbaikan sarana dan prasarana lingkungan 5 SKM atau 6 %, perbaikan lantai atau atap rumah. Ada anggota SKM yang tidak menggunakan dana sesuai peruntukannya, mereka membeli kebutuhan sehari-hari seperti kulkas, membayar utang atau alat elektronik. Perilaku inilah diupayakan diantisipasi secara cepat, agar dana tersebut dapat berkelanjutan.

Perilaku pada Aspek Prestasi dalam Pemanfaatan Dana Bergulir.

Prestasi merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai seseorang untuk mengetahui sejauhmana seseorang mencapai prestasi yang diukur atau dinilai. Bumberg & Pringle (Hasibuan, 2001; Jewell & Siegall, 1990; Umam, 2010) menyatakan bahwa prestasi merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan padanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Kemudian dipertegas kembali Bumberg & Pringle (Jewell & Siegall, 1990), bahwa ada beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja seseorang, yaitu kesempatan, kapasitas, dan kemauan (Umam, 2010).

Mencermati pendapat para ahli dan keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti sebatas mengkaji tentang kemauan dilihat dari aspek motivasi para anggota KSM dalam memanfaatkan dana bergulir melalui P2KP. Pola pelaksanaan program P2KP di Kecamatan Palu Timur, penentuan sasaran penerima bantuan dana bergulir merupakan warga miskin di lingkungan keluarahan yang dinilai dan diputuskan sendiri oleh masyarakat setempat. Kelompok sasaran ini bersifat sukarela dan memiliki ikatan sosial yang dibangun karena memiliki tujuan ekonomi, tujuan sosial, tujuan pembelajaran yang sama serta berdomisili ditempat yang sama. Tujuan dan

sasaran pelaksanaan progrm P2KP sejalan dengan pendapat A. Rindinell (1990), bahwa keberhasilan pembangunan pada negara berkembang (1) diarahkan pada masyarakat miskin, (2) Bantuan tersebut digunakan untuk peningkatan pendapatan penduduk miskin serta (3) spesifik kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Di Kecamatan Palu Timur bahwa masyarakat yang terlibat dalam anggota KSM jika ditinjau dari segi motivasi ada yang terpaksa, ikut-ikutan, dan ada yang memiliki kemauan/ kesadaran. Masyarakat yang kategori terpaksa sekitar 3 %, yang ikut-ikutan sekitar 8 % dari 87 dan motivasi masyarakat dengan alasan memiliki kesadaran 87 % bahwa usaha yang dimiliki ingin dikembangkan bagi yang memiliki usaha, tapi yang belum juga memiliki motivasi untuk bergabung karena ingin mendapat modal membuka usaha, agar ekonomi dan kebutuhan keluarga terpenuhi.

Kalau mengkaji tentang hasil penelitian, bahwa masyarakat memiliki perilaku prestasi yang baik, karena sebahagian besar masyarakat menganggap bantuan pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin. Motivasi yang tinggi dari masyarakat akan mempengaruhi keberlanjutan dari dana bergulir. Hal ini sesuai dengan konsep tekanan perilaku yang dikemukakan Steers & Porter (1985a) bahwa efektivitas organisasi dapat tercapai berdasarkan perilaku dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini perilaku KSM tercermin dari motivasi positif terhadap pelaksanaan pencaiara dan pemanfaatan dana bergulir (P2KP). Begitupula Steers & Porter (1985a), Hasibuan (2001) mempertegas bahwa salah satu indikator efektivitas adalah motivasi. Artinya motivasi masyarakat ikut bergabung dalam mensukseskan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah motivasi dari dalam diri setiap individu dengan alasan bahwa dirinya masih butuh bantuan untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangganya.

SIMPULAN

Perilaku anggota masyarakat masih ada yang belum komitmen dalam pengembalian dana bergulir. Namun diakui bahwa perilaku masyarakat masih berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pengembalian dana tersebut terlambat. Perilaku anggota masyarakat dari segi motivasi yaitu memiliki kemauan untuk bergabung dalam kelompok swadaya masyarakat agar mereka mendapat bantuan untuk mengembangkan usaha demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Segi pemanfaatan sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat miskin dan antusias mengikuti kegiatan jika ada pertemuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H., & Salam, R. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Importance Performance Analysis (IPA) pada Kecamatan Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Scientific Pinisi*, 2(April 2016), 16–20.
- Daraba, D., Ramli, R. M., Sakawati, H., & Salam, R. (2018). Quality Of Service Manufacturing Of Trade License Line In Office Of Investment Investment And Licensed Agency (BPMPT) Regency Of Bulukumba. In *THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2018* (pp. 485–490).

- Jaedun, A. (2010). Metode Penelitian Evaluasi Program. *Makalah Disampaikan Pada Kegiatan Pelatihan Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan Dan Evaluasi Program Pendidikan Di Lembaga Penelitian. Universitas Negeri Yogyakarta*, 23–24.
- Levine, L. W. (1990). *Highbrow/lowbrow: The emergence of cultural hierarchy in America*. Harvard University Press.
- Lisasih, N. Y. (2011). Kendala dalam pemungutan pajak daerah.
- Priyowidodo, G., Swestin, G., & Vidyarini, T. N. (2015). Komunikasi Politik dan Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik. ANDI.
- Saggaf, M. S., Aras, M., Akib, H., Salam, R., Baharuddin, A., & Kasmita, M. (2018). The Quality Analysis of Academic Services Based on Importance Performance Analysis (IPA).
- Saggaf, S., Salam, R., Kahar, F., & Akib, H. (2014). Pelayanan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern. *Jurnal Ad'ministrare*, 1(1), 20–27.

